

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wahhab, Khallaf. "al-Siyāsah al-Syar'iyah aw Nizām al-Dawlah al-Islāmiyyah fī Syu'ūn al-Dustūriyyah wa al-Khārījīyyah wa al-Māliyyah." *Maṭba'ah al-Taḡaddum* (al-Qāhirah (Kairo)), H / 1977 M 1397.
- Sachedina, Abdulaziz Abdulhussein. *Kepemimpinan dalam Islam*. Bandung: Mizan, 1986.
- Sari Adena Fitri Puspita and Purwono Sungkono Raharjo. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 04 (2022).
- Perdana, Aditya, et al. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019.
- Athooillah, Ahmad Althof. "Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa." *Jurnal Hukum Lex Generalis* (Surabaya) 4, no. 8 (2024).
- Al-Ghazali dan Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 499M.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib |. *Al-Ahkam as-Sultāniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Andana, Apri. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Pemilihan Umum Daerah." *Limbago: jurnal of constitutional law* 5, no. 3 (2025): 120.
- Anggraini. "Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Dan Tantangan Demokrasi Elektoral." *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 2022.
- Artani, hasbi. "Musyawarah dan Demokrasi: Analisis Konseptual dalam konteks indonesia." *Granit* (Jakarta), 2004.
- Riyanto, Aspin. *Negara Kesatuan: Konsep, Asas, dan Aktualisasinya*. Bandung: Yapemdo, 2006.
- Atika, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022.
- Baehaki, Kadimuddin. "Hukum Masa Depan Pemilu Indonesia: Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2024." *Jurnal Media Hukum* 13, no. 2 (2025): 265.
- Basith, Adam Fadillah Al, Rayhan Alhakim, dan Hanifah Khusnul Khatimah. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-

Xxi/2024: Reformasi Legislasi Bidang Kepemiluan Di Indonesia.” *NOMOKRASI Jurnal eDHaK Fakultas Hukum Unhas* 3 (2025).

Begouvic, M. Eza Helyatha. “Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *Jurnal Lex Superior, Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa* (palembang) 1 (2022).

Darmawan, Muchlisin Muchlisin, dan Mohammad Ahsanul Khuluqi. “The Legal Force of the Constitutional Court’s Decision on the Impeachment Process from the Perspective of the State of Islamic Law and Politics.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 (2025).

Dermawan. “Rekonstruksi Hukum Pemilihan Umum Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” *TADKHIRA: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025).

Pratama, Dhendy Setiawan. “Legitimasi Publik Dan Tuntutan Pemakzulan Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *LEX STRICTA : Jurnal Ilmu Hukum* (Medan) 3, no. 3 (2025).

Sabrina, Dian Fitri.. *Krisis Konstitusional Putusan MK Nomor 135/2024: Pemisahan Pemilu dan Ancaman terhadap Demokrasi Elektoral*. t.t. Diakses 20 April 2026. <https://harian.fajar.co.id/2025/07/06/krisis-konstitusional-putusan-mk-nomor-135-2024-pemisahan-pemilu-dan-ancaman-terhadap-demokrasi-elektoral/?com>.

DPR RI. “Konstitusionalitas dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.” *Tim Peneliti PUSaKO FH Universitas Andalas*, 2021. <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/issue/download/51/25>. Diakses pada 26 Mei 2026.

———. *Putusan MK Timbulkan Dilema Konstitusional*. 2025. <https://jdih.dpr.go.id>. Diakses pada 19 Mei 2026

Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditnya Bakti, 2006.

Gazali. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Mataram: Sanabil, 2022.

Sodikin. *Hukum Pemilu (Pemilu sebagai praktek ketatanegaraan)*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.

Dzajuli. *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2004.

Wibowo, Eko, Ismail, dan Hartana. “Pelaksanaan Pemilihan Presiden Yang Sesuai Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 2 (2024).

- Fahmi, Khairul. "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2016): 119.
- Faqihuddin. *Mempertimbangkan Masalah atau Mafsadah yang Dominan dalam Penetapan Hukum*. 23 Agustus 2024. <https://istinbat.co/2024/08/23/mempertimbangkan-masalah-atau-mafsadah-yang-dominan-dalam-penetapan-hukum/?utm>. Diakses pada 19 Juni 2026
- Fatullah, Ahmad Arri. "Implikasi Konstitusional Dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pilkada." *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 2025, 40–45.
- Firdaus, Muhammad Bintang. "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* (Jakarta) 3, no. 1 (2025).
- Gunawan, Gugun, dan Deny Guntara.. "Implikasi konstitusional putusan MK nomor 135/PUU-XXII/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 1 (2025).
- Guntur Hamzah. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Mudjib, H. Abdul.. "kaidah-kaidah ilmu fiqh." *Kalam Mulia* (Jakarta), 2005.
- Habbodin, Muhtar, dan Mohamad Firdaus. "Kekuasaan Dan Kedaulatan Memerintah." *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)* 3, no. 1 (2022): 50–62.
- Aminudin, Hauwin Nur Afifah. "Rekayasa Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXIII/2024 Oleh Lembaga Legislatif Perspektif Siyasah Dusturiyah." Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- Hertanto, Yudhi, Iqlima Zahari, Fatma Faisal, dan Johannes Triestanto. "Kebijakan Publik Pemerintah Dalam Perspektif Masalah Dan Prinsip Negara Hukum." *Jurnal Kolaboratif Sains* (Palu) 9, no. 2 (2026).
- Nurrahmah, Hilwa. "Tinjauan Siyasah Dusturiah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun[No title found]." *Journal of Multidisciplinary research Development* (Bandung) 7, no. 4 (2024).
- Huda, Muhamad Nurul. "Kedudukan dan Peran Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd serta Relevansinya pada Kinerja DPR." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* (Yogyakarta) 2, no. 1 (2022).

- Thaha, Idris. "Revolusi Iran dan Imam Khomeini: Wilayat al-Faqih dan Demokrasi." *Revolusi Iran dan Imam Khomeini: Wilayat al-Faqih dan Demokrasi* 5, no. 13 (2007).
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. "Peraturan & Perundang-undangan." Putusan3 Mahkamah Agung RI, 2017. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9d9ff60bf6b96af5f313733303437.html>. Diakses pada 17 April 2026
- Nurdiyanto, Irwan, dan Achmad Musyahid.. "Kaidah Terkait Mafsadat yang Saling Berhadapan." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (Makassar) 3, no. 1 (2025).
- Iskandar Syukur. "Implementasi Demokrasi dalam Peranan Ahl al-Halli wa al-'Aqdi." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'a* (Bandar Lampung) 11, no. 01 (2019).
- Ismail, Nasaruddin, dan Ali Imron. "Kaidah Fiqhi (Kebijakan Penguasa terhadap Rakyat Dilihat oleh Kemaslahatan)." *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society KIHES* 1 (2022).
- Simamora, Janpatar.. "Perlindungan Hak Memilih sebagai Hak Konstitusional Warga Negara: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012." *Jurnal yudisial* (Medan) 6, no. 2 (2013).
- Asshiddiqie, Jimly.. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika, 2011.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Kautsar, Muhammad Al. "Pembatasan Periode Masa Jabatan Anggota Legislatif." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* (banda aceh) 3 (2019).
- "kedaulatan rakyat adalah: pengertian, prinsip, dan penerapan di indonesia." 30 Oktober. [https://kab-yalimo.kpu.go.id/blog/read/8621\\_kedaulatan-rakyat-adalah-pengertian-prinsip-dan-penerapannya-di-indonesia](https://kab-yalimo.kpu.go.id/blog/read/8621_kedaulatan-rakyat-adalah-pengertian-prinsip-dan-penerapannya-di-indonesia). Diakses pada 12 April 2026
- Laode Harjudin, La Tarifu, Harnina Ridwan, dan La Ode Muhammad Elwan. "Menggugat Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Tanpa Pemilihan: Tergerusnya Kedaulatan Rakyat Dan Menguatnya Dominasi Pemerintah Pusat." *Journal Publicuho* 5, no. 4 (2023): 1355–66.
- Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-34. Jakarta: Pradnya Paramita, 2011.
- Lukpinius. "Konsep wilayah Al-Faqih Dalam Sistem Politiksyi'Ah Imamiyah." *E-journal UINFAS* (Bengkulu) 1, no. 1 (2016).

- MD, Mahfud. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Indrati, Maria Farida, S. *Ilmu Perundang-Undangan 2*. Jakarta: Kanisius, 2018.
- Budiarjo, Mariam . *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Mayasari, Fil. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Perspektif Hukum Progresif.” Universitas Islam Negeri Salatiga, 2025.
- Ritonga, Mei Fiani dan Irwansyah. “Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK RI No. 42/PUU-XIX/2021 perspektif fiqih siyasa.” *Jurnal Syari'ah & Hukum* (Medan) 6, no. 2 (2024).
- Iqbal, mohammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Grob, 2016.
- Mufti, Muslim, dan Didah Durrotun Naafisah. *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Huda, Ni'matul. dan Mohammad Imam Nasef. *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nugroho, Rahmat Muhajir, Sobirin Sobirin, dan Reyhan Gymnastiar. “Menata ulang Sistem Kepemiluanpasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-Xxii/2024: Analisis Ratio Legis dan Arah Jalan Tengah Menujukonsolidasi Demokrasikonstitusional.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 2 (2025).
- Asia Hamzah, Nur. “Darurat Membolehkan yang Dilarang.” *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* (Makassar) 11, no. 2 (2020).
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Pakpahan, Zainal Abidin. “Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi: Analisis Kritis Terhadap Konstitusionalisme Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Advokasii* 13, no. 2337 (2025).
- Parapat, Apwan Riadi dan Khalid. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 Puu-Xxii/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah Perspektif Siyasa Dusturiyah.” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 1 (2025): 527–37.

- Pratama, Maulana Hafidz, Andre Kurniawan, dan M. Nabil Alifah. "Relanvansi Konsep Al- Mashlahah dalam Pembentukan Kebijakan Publik." *TABAYYUN Journal of Islamic Studies* (Sumatra) 2, no. 2 (2023).
- Putry Kartika, Aprilya, Agus Tohawi. "Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (2024).
- Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-undang Terhadap UUd 1945 (2024).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-undang terhadap UUd 1945 (2025).
- Ridho, Mohamad Faisal. "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia." *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan* (Jakarta), 2017.
- Riska. "Implikasi Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan Anggota DPRD." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 6 (2025).
- Rizal, Moch. Choirul. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.
- Rosyidah, Dede. *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Sadzali, Ahmad. *Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif*. Vol. 2. 2022.
- Mujani, Saiful. "Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru." *Mizan* (Jakarta), 2011.
- Saputra, Gusti Rizky Dwi. "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-Xxii/2024 Dalam Rekontruksi Desain Pemilu Nasional Dan Lokal Di Indonesia." *Jurnal Media Akademik* (Jakarta), 2025.
- Silalahi, Elisabeth Felita, dan Andina Elok Puri Maharani. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terkait Desain Pemilihan Umum Serentak guna Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Demokratis." *Res Publica* 5, no. 2 (2021).
- Nurhayati, Siti. "Dinamika Perkembangan Demokrasi serta Problematikanya Pasca Reformasi." *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance* 3, no. 1 (Maret 2023): 14–30.
- Soehine. *Ilmu negara*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Soekanto, Soerjono, . *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim. "Al-maqosid Al-syariah: Teori dan Implementasi." *jurnal sharia and humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70.
- Sukma, Ayu Mega. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2024 tentang Perubahan Desain Konstitusional Kesenjangan Pemilu di Indonesia." *Collegium Studiosum Jurna*; (Samarinda) 8, no. 2 (2025).
- Sulardi. *Reformasi Hukum: Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat dalam Membangun Demokrasi*. Malang: In-TRANS Publishing, 2009.
- Hartono, Sunaryati. "Membangun Budaya Hukum Pancasila sebagai Bagian dari Sistem Hukum Nasional Indonesia di Abad 21." *Veritas et Justitia* (Bandung) 1, no. 2 (2015).
- Suryana, Eka Pala. "Kajian Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilihan Umum Nasional dan Lokal." *Jurnal Hukum Legalita* 07, no. 2 (2025): 3–4.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Tjenreng, M. B. Zubakhrum. *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak*. Cetakan pertama. Depok: Papas Sinar Sinanti, 2020.
- Utomo, Deny Setiyo, dan Hananto Widodo. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Positive legislator (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024)." *Jurnal Rechts* 15, no. 1 (2026).
- huda, Nurul. "Evaluating the Election Law in Indonesia for Strengthening Democracy and Ens." *Law Reform* 21, no. 2 (2025).
- Wijayanti, Dwi, Samsul Munir, dan Nurul Syalafiyah. "Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* (Nganjuk) 9, no. 2 (2024).
- Wahyuni, Willa. "Tanpa Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK, Potensi Timbulkan Kekosongan Hukum." *Hukum Online*, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tanpa-revisi-uu-pemilu-pasca-putusan-mk--potensi-timbulkan-kekosongan-hukum-lt68c0fd278f8d7/>. Diakses pada 12 Mei 2026
- Willius Kogoya. *Buku Ajar Teori dan Ilmu Konstitusi*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2015.
- Zainurahman, Moch Fiqri, dan Khulaila Inda Fikriyah. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal serta Dampaknya Terhadap Masa Jabatan

Kepala Daerah dan DPRD.” *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*  
5, no. 2 (2025).